



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN PAJAK DI  
INDONESIA YANG DIANGGAP INKONSTITUSIONAL**

**TESIS**

**FELLISIA, S.H.**

**0806426894**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN PAJAK DI  
INDONESIA YANG DIANGGAP INKONSTITUSIONAL**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**

**FELLISIA, S.H.**

**0806426894**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fellisia, S.H.

N.P.M. : 0806426894

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Fellisia, S.H.  
N.P.M. : 0806426894  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN  
PAJAK DI INDONESIA YANG DIANGGAP  
INKONSTITUSIONAL

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc.



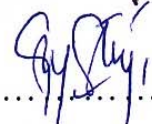
(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



(.....)

Penguji : Eka Sri Sunarti, S.H., M.H., CN.



(.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 18 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dewan Penguji pada sidang tesis, beserta segenap jajarannya.
3. Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Eka Sri Sunarti, S.H., M.H., CN. selaku Dewan Penguji pada sidang tesis.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Segenap staf sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pelayanannya.
7. Papa, Mama, Kakak, dan Adik-adik yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama menjalani studi.

8. Peterson yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama menjalani studi.
9. Eel, Yovan, Ulee, Apao, Riana, Kiki, Intan, Muli, dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
10. Darianne, Dini, Daniel, Dyah, Bang Ronald, Bang Yudo, Yana, Vinca, Vivin, Irwan, Darwinto, Kristanto, Pak Gunawan Kartikahadi, Claudia, Esti, Natalia, dan seluruh teman angkatan 2008 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk persahabatan, doa dan dukungannya.
11. Seluruh sahabat angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, terima kasih untuk persahabatan, doa dan dukungannya.
12. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk ini dimohon maaf dan diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 18 Juni 2010

Penulis

Fellisia, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fellisia, S.H.  
N.P.M. : 0806426894  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA YANG DIANGGAP INKONSTITUSIONAL”**,

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juni 2010

Yang menyatakan

(Fellisia, S.H.)

## ABSTRAK

Nama : Fellisia, S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN  
PAJAK DI INDONESIA YANG DIANGGAP  
INKONSTITUSIONAL

Tesis ini membahas mengenai pernyataan Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI bahwa Pengadilan Pajak inkonstitusional. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan metode penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan agar DPR bersama-sama dengan Presiden menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sistem pembinaan “dua atap” yang dianut oleh Pengadilan Pajak dapat dialihkan menjadi “satu atap” kepada Mahkamah Agung; Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Kesediaan Bapak Patrialis Akbar untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Kata Kunci :  
Pajak, Pengadilan Pajak, Inkonstitusional.



## **ABSTRACT**

*Name* : Fellisia, S.H.  
*Study Program* : Magister Notary  
*Title* : **JUDICIAL REVIEW OF TAX COURT DEEMED  
UNCONSTITUTIONAL IN INDONESIA**

*The focus of this study is the statement of Mr. Patrialis Akbar as the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia that the Tax Court as unconstitutional. The research is the character of the juridical-normative, with eksplanatoris research methods. The results suggested that the Parliament together with the President to adjust some provisions of Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court; guidance system "two-roof" adopted by the Tax Court can be transferred to the "one-roof" to the Supreme Court; Giving explanations clearly against the provisions of Article 5 of Law of Tax Court; Willingness Patrialis Mr. Akbar to clarify such a statement.*

*Keywords :*  
*Tax, Tax Court, Unconstitutional.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	10
1.3 Metode Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA YANG DIANGGAP INKONSTITUSIONAL</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	13
2.1.1 Pengertian dan Filosofi Pajak .....	13
2.1.2 Fungsi dan Asas-asas Pajak .....	18
2.1.3 Penggolongan dan Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak.....	25
2.1.4 Sistem Perpajakan di Indonesia .....	37
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Pajak .....	41
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Pajak.....	41
2.2.2 Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Pajak .....	46
2.2.3 Putusan Pengadilan Pajak dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak .....	63
2.3 Tinjauan Yuridis Tentang Pengadilan Pajak Di Indonesia Yang Dianggap Inkonstitusional .....	67
2.3.1 Kekuasaan Kehakiman .....	67
2.3.2 Pembuatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak .....	70
2.3.3 Fungsi Pengadilan Pajak .....	74
2.3.4 Uji Materiil Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	77
2.3.5 Prinsip-Prinsip Yang Dianut Oleh Pengadilan Pajak .....	86
<b>3. PENUTUP</b> .....	<b>89</b>
3.1 Simpulan .....	89
3.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>92</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Artikel berjudul “Aturan Pengadilan Pajak Inkonstitusional”
- Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor  
004/PUU-II/2004
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor  
011/PUU-IV/2006

